



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/770/B.09/HK/2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019-2024
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan, diperlukan Indikator Sasaran RPJMD yang berorientasi hasil, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab Kepala Daerah, dan merepresentasikan atau relevan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan target capaian Tahun 2024, sebagai upaya untuk menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2019-2024 serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini bertujuan untuk:
- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019-2024;
 - b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 770 /B.09/HK/2019
 TANGGAL : 29 OKTOBER2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia) | 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama | 73 | 1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah | 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | Hasil laporan Tahunan Kementerian Agama | Kanwil Kementerian Agama/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung | 68,5 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| | | | | 2. Tingkat Kriminalitas | Angka | $\frac{\sum \text{Kasus kriminalitas yang terselesaikan}}{\sum \text{Keseluruhan kasus}} \times 100$ | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 75,6 | 78,85 | 82,18 | 85,50 | 88,83 | 92,15 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---|---|--------|---|--|--------|------|------|------|------|------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat | 3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | Indeks | $\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$ dimana : X_{ijk} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke i, variabel ke j, indikator ke k. X_{ideal} : tingkat capaian ideal yang mungkindicapai dari indikator xijk X_{terburuk} : tingkat capaian terburuk dari indikator xijk Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 \leq I(xijk) \leq 1$: untuk memudahkan dimana : IDI = Indeks Demokrasi Indonesia P = Nilai penimbang dari aspek ke 1 I (A) = Indeks aspek ke 1 i = 1 = aspek kebebasan sipil, 2 = aspek hak-hak politik, 3 = aspek lembaga demokrasi. | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 2. Pelestarian Warisan Budaya | 2. Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan | 100 | 3. Meningkatnya Pelestarian Budaya | 4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian | Angka | Hasil penetapan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik | 3. Nilai Reformasi Birokrasi | A | 4. Meningkatkan kualitas Implementasi reformasi birokrasi | 5. Nilai Reformasi Birokrasi | Angka | Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | CC | B | B | BB | BB | BB | A |
| | | | 5. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja | 6. Opini BPK/WTP | Opini | Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Daerah | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | 7. Nilai SAKIP | | Hasil evaluasi Kemenpan. RB | Kemenpan. RB | B | BB | BB | A | A | A | A |
| | | | 6. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat | 8. Indeks Kepuasan Masyarakat | IKM | $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Bobot Nilai Rata-rata tertinggal = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$ | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | CC | B | B | BB | BB | BB | A |
| 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia | 4. Indeks Pembangunan Manusia | 72,72 | 7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat) | 9. Angka Harapan Hidup | Tahun | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 72 | 72,10 | 72,19 | 72,29 | 72,39 | 72,48 | 72,48 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 8. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah | 10. Harapan Lama Sekolah | Tahun | Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t sama dengan faktor koreksi persentase kali jumlah Penduduk usia 1 pada tahun1 dibagi jumlah penduduk usia 1 pada tahun 1 | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 12,55 | 12,64 | 12,71 | 12,78 | 12,85 | 12,92 |
| | | | | 11. Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | Kombinasi antara partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 |
| | | | 9. Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas | 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | IPG = $\frac{IPM \text{ Laki-laki}}{IPM \text{ Perempuan}} \times 100$ | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 90,80 | 91,03 | 91,26 | 91,49 | 91,72 | 91,95 |
| | | | | 13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | IDG = rata-rata aritmatik dari 3 indeks a. Keterlibatan perempuan dalam parlemen b. Perempuan sebagai tenaga profesional c. Sumbangan pendapatan perempuan | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 64,03 | 64,24 | 64,45 | 64,66 | 64,87 | 65,08 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--|--|-----------|--|---|-----------|------|------|------|------|------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | 14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak | Angka | Jumlah Kabupaten Layak Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri | Persen | $\frac{\sum \text{Penyandang Disabilitas} \times 100\%}{\sum \text{penyandang Disabilitas}}$ | Dinas Sosial Provinsi Lampung | 1,86 | 2,18 | 2,60 | 3,12 | 3,74 | 4,49 |
| | | | 10. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya) | 16. Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS) | Peringkat | Hasil Peringkat oleh Kemenpora | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung | 4 (POPWL) | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|--|---|---------------|--|--|--------|--|--|--------|------|------|------|------|------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 71,1 | 11. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | 17. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) | Angka | $\frac{\text{Jml. penganggrrn. terbuka usia angk. Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia angkatan kerja}} \times 100\%$ | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 4,17 | 3,85 | 3,26 | 3,66 | 3,57 | 3,48 |
| 5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) | 6. Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indek konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi) | 91 | 12. Meningkatnya konektivitas antar wilayah | 18. Indeks Konektivitas | Indeks | $\mathcal{E} = \frac{e}{v}$ Dimana : $\mathcal{E} = \sum$ Indeks konektivita $e = \sum$ Jaringan jalan $v =$ Kota dalam satu wilayah | Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi Lampung | 6,1 | 6,2 | 6,33 | 6,46 | 6,6 | 6,67 |
| | | | 13. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang | 19. Rasio Elektrifikasi RumahTangga | Persen | $\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$ | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| | | | 14. Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumber daya Air | 20. Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP>2 | Persen | $\frac{\text{Luas sawah Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dengan panen} > 2x \text{ setahun (Ha)}}{\text{Luas sawah Daerah Irigasi kewenangan Provinsi (Ha)}} \times 100\%$ | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung | 33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|---|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 7. Capaian rata-rata Peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%) | 83,65 | 15. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman | 21. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman | Persen | $\frac{\text{Jml R.T. berakses terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah rumah Tangga}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung | 71,50 | 72,90 | 74,63 | 76,44 | 78,36 | 80,34 |
| | | | | 22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi | Persen | $\frac{\text{Jml Rumah Tangga berakses Sanitasi}}{\text{Rumah Tangga}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung | 66,41 | 69,31 | 71,37 | 73,53 | 75,99 | 78,68 |
| | | | | 23. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh | Persen | $\frac{\text{Luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,37 |
| | | | | 24. Persentase Rumah tidak Layak huni | Persen | $\frac{\sum \text{RTLH yang tertangani}}{\sum \text{Rumah disuatu wil}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung | 4,50 | 3,98 | 3,25 | 2,52 | 1,78 | 1,03 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|---|---------|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis Pertanian | 8. Pertumbuhan Ekonomi | 5,7-6,0 | 16. Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian | 25. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian | Persen | $\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = sektor Pertanian Tahun n = Tahun Pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 0,93 | 1,63 | 2,30 | 2,92 | 3,09 | 3,19 |
| | | | 17. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan | 26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | Persen | $\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = sektor Industri Pengolahan Tahun n = Tahun Pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 7,46 | 6,23 | 6,26 | 6,28 | 6,29 | 6,33 |
| | | | | 27. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | Persen | $\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = sektor Industri Perdagangan Tahun n = Tahun Pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 5,24 | 7,26 | 8,20 | 9,08 | 9,87 | 10,73 |
| | 9. Laju Inflasi | 3,0-3,5 | 18. Menjaga stabilitas harga | 28. Laju Inflasi | Inflasi | $\frac{[(1+\Delta inf)^t - 1]}{\Delta inf} \times 100\%$ $\Delta inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf _n = nilai inflasi pada tahun n Inf _{n+1} = nilai pada 1 tahun berikutnya n = Tahun | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 3,0 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|--------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 10. Angka Kemiskinan | 9,18 | 19. Menurunnya Angka Kemiskinan | 29. Angka Kemiskinan | Persen | $P_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^n$ <p> Z = Garis Kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk </p> | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 12,0 | 11,10 | 10,62 | 10,14 | 9,66 | 9,18 |
| | 11. Indeks <i>Williamson</i> | 0,19 | 20. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | 30. Indeks Williamson | Indeks | $IW = -Y \sqrt{\frac{\sum (YF_i)^2}{N}}$ <p> Yi = PDRB perkapita di Kab./Kota i Y = PDRB Perkapita rata-rata Prov. Fi = \sum penduduk di Kab./Ko n = \sum Penduduk Provinsi </p> | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| | 12. Indeks Gini | 0,3 | 21. Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat | 31. PDRB perkapita (Juta) | Indeks | $\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$ | Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | 42,94 | 45,54 | 48,20 | 50,80 | 53,41 | 56,00 |
| 7. Mewujudkan Keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan pembangunan | 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 63,32 | 22. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | $IKA + IKU + IKTL$ <p> Dimana : IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kualitas Udara IKTL = Indek Kualitas Tutupan Lahan </p> | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | 57,13 | 59,63 | 61,15 | 61,92 | 62,57 | 63,32 |

| TUJUAN RPJMD | | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU) | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA | Target | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|--------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 23. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | 33. Indeks Resiko Bencana | Indeks | <p>$R = H \times V / C$ dimana :</p> <p>R = Risiko Bencana</p> <p>H = Ancaman (<i>Hazard</i>), adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau harta benda.</p> <p>V = Kerentanan (<i>Vulnerability</i>), adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (<i>disaster</i>) atau tidak</p> <p>C = Kapasitas (<i>Capacity</i>) adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadi bencana.</p> | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung | 144,9 | 144,7 | 144,3 | 143,9 | 143,5 | 143,1 |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

